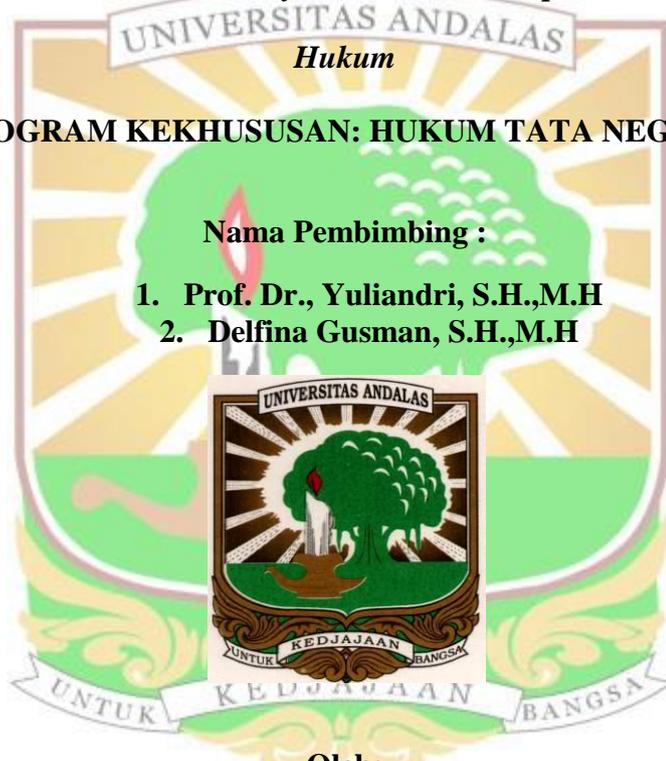


SKRIPSI

**PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 PERIHAL HAL
IHWAL KEAGENTINGAN YANG MEMAKSA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA

Nama Pembimbing :

- 1. Prof. Dr., Yuliandri, S.H.,M.H**
- 2. Delfina Gusman, S.H.,M.H**

Oleh:

REFI YANA
1110113176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2016

	No. Alumni Universitas	REFI YANA	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl. Lahir	: Koto Padang/ 28 Maret 1992	g) IPK
	b) No. BP	: 1110113176	h) Fakultas
	c) Nama Orang Tua	: Nasrun Chan	i) Lama Studi
	d) Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara (PK VI)	j) Alamat
	e) Tanggal Lulus	: 22 September 2016	
f) Predikat Lulus	: Sangat Memuaskan		Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya

PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 MENGENAI HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

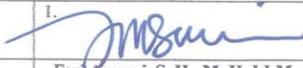
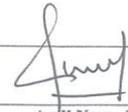
(Refi Yana, 1110113176, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman, Tahun 2016)

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditujukan untuk keselamatan negara. Sehingga pemerintah dalam hal ini dapat bertindak lekas dan tepat. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Kaitan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Perihal Hal IHWal Kegentingan yang Memaksa? Dan Bagaimana Implikasi Keberadaan Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis nomatif yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang, serta sumber seperti artikel, dokumen-dokumen, dan bukan dari hasil data lapangan. Sumber-sumber bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil pembahasan yang penulis dapatkan dari penelitian adalah sebagai berikut, Pertama, Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak sesuai dengan syarat kegentingan hal ikhwal yang memaksa. Pengembalian hak kedaulatan rakyat sudah sangat tepat. Akan tetapi, penulis tidak melihat bahwa kegentingan yang memaksa seperti yang telah dibahas dalam proses lahirnya Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengacu pada syarat Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Kedua, Implikasi Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian dengan hadirnya Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka ketentuan perihal pemilihan langsung, telah teratasi atau dengan kata lain telah mengalami harmonisasi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 September 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Feri Amsari, S. H., M. H.,LLM	Andi Nova, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : Charles Simabura, S. H., M. H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: